

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(STUDI DI DESA KALIMATI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN  
SIDOARJO, JAWA TIMUR)**

**Dwi Anggraini**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[dwianggrainii135@gmail.com](mailto:dwianggrainii135@gmail.com);

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id);

**Radjikan**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan rutin. Pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi yang baik, koordinasi antar pelaksana, serta komitmen pendamping. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan

sumber daya manusia, sarana pendukung, dan masih adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara umum, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, George C. Edward III.*

### **ABSTRACT**

Poverty remains a social issue that poses challenges to national development. One of the government's efforts to alleviate poverty is through the Family Hope Program (PKH), a conditional social assistance program provided to poor and vulnerable families. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty reduction efforts in Kalimati Village, Tarik District, Sidoarjo Regency. This study employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which encompasses data reduction, data display, and conclusion drawing. The theory utilized is George C. Edward III policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the Family Hope Program in Kalimati Village has generally been carried out fairly well. Communication between implementers and beneficiaries is established through socialization and routine meetings. Regarding the resource aspect, several constraints are still found, particularly the limited number of facilitators and supporting facilities that are not yet fully adequate. The implementers' disposition demonstrates a good commitment to carrying out facilitation duties. The bureaucratic structure has functioned in accordance with the respective tasks and functions of each implementer. Supporting factors for PKH implementation include good communication, coordination among implementers, and the commitment of the facilitators. Meanwhile, the inhibiting factors involve the limitations of human resources, supporting facilities, and public perceptions regarding the targeting accuracy of beneficiaries. In general, the Family Hope Program has contributed to helping improve community welfare and supporting poverty reduction efforts in Kalimati Village.

**Keywords:** *Policy Implementation, Family Hope Program, Poverty Alleviation, George C. Edward III.*

### **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga

berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan produktivitas masyarakat (Djabar et al., 2022)

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi banyak negara dan berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk ketimpangan ekonomi serta distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi perhatian, yaitu tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Negara-negara berkembang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Bisnis et al., 2014).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan. Keterbatasan pendapatan tersebut juga berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar hidup lainnya seperti kesehatan dan pendidikan (Sangihe, 2021).

Salah satu indikator kemiskinan yang umum digunakan adalah tingkat pendapatan karena pendapatan mencerminkan standar hidup riil masyarakat. Keterbatasan pendapatan tidak hanya menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi masalah yang memerlukan perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial (Mahulette et al., 2022)

**Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2023–2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Secara nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan (BPS, 2024)

**Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai sekitar 3,89 juta jiwa atau sebesar 9,56 persen dari total penduduk Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan penanganan melalui berbagai program pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

**Gambar 3. Data Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005–2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan ekonomi cukup pesat di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 masih sebesar 4,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program perlindungan sosial.

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sehingga mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Permensos, 2018)

Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan Program Keluarga Harapan diperkuat melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Program Keluarga

Harapan Kabupaten Sidoarjo. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo (Perda Sidoarjo, 2024)

**Tabel 1. Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tarik**

Kecamatan	Desa	Jumlah Penerima (KPM)
Tarik	Mliriprowo	67
	Kedungbocok	196
	Singogalih	168
	Tarik	176
	Mergobener	164
	Mergosari	161
	Kendalsewu	108
	Klantingsari	209
	Kalimati	263
	Gempolklutuk	145
	Banjarwungu	266
	Balongmacekan	121
	Gampingrowo	134
	Sebani	123
	Kramattemenggung	73
	Mindugading	149
	Kemuning	233
	Janti	178
	Segodobancang	119
	Kedinding	73
Total		3.126

*Sumber: Kecamatan Tarik*

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk melaksanakan keputusan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif (Edward, n.d.)

Menurut George C. Edward III (1980), terdapat empat faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian

informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Konsep Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diberikan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan PKH adalah meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Program ini juga diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan PKH didukung oleh pendamping sosial yang memiliki tugas melakukan pendampingan, pemantauan, dan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, pendamping juga melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang bertujuan memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesejahteraan sosial (Permensos, 2018)

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berbagai layanan sosial lainnya (Sangihe, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kalimati merupakan salah satu desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang cukup tinggi di Kecamatan Tarik, yaitu sebanyak 263 KPM.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan memudahkan pelaksana maupun penerima manfaat dalam memahami tujuan, prosedur, serta ketentuan program yang dijalankan (Edward III, 1980).

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, informasi mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan program juga diberikan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat telah memahami tujuan dan manfaat Program Keluarga Harapan. Pendamping PKH juga aktif memberikan informasi terkait pencairan bantuan, kewajiban penerima manfaat, serta perubahan kebijakan yang berkaitan dengan program. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin antara pelaksana dan penerima manfaat dapat dikatakan berjalan cukup baik.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1980), sumber daya meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalimati belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah pendamping PKH yang harus menangani cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga beban kerja pendamping menjadi lebih besar dalam melaksanakan tugas pendampingan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi maupun pendampingan masih memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan tetap dapat berjalan karena adanya dukungan dari pemerintah desa dan kerja sama antar pelaksana program dalam memberikan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dari aspek informasi dan kewenangan, pendamping PKH telah memperoleh pedoman pelaksanaan program yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pembaruan dan validasi data penerima manfaat yang terkadang menimbulkan perbedaan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, indikator sumber daya dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati belum berjalan secara optimal, meskipun secara keseluruhan program tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

## **3. Disposisi**

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, disposisi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalimati menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pendamping PKH memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi serta memberikan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Komitmen tersebut terlihat dari upaya pendamping dalam memberikan informasi terkait program, membantu masyarakat yang mengalami kendala, serta melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara rutin. Melalui kegiatan tersebut, penerima manfaat memperoleh edukasi mengenai kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, dan pengelolaan keuangan keluarga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, pendamping PKH juga menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat. Apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan informasi atau mengalami kendala terkait bantuan sosial, pendamping berupaya memberikan penjelasan dan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator disposisi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1980), struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalimati telah berjalan dengan cukup baik. Setiap pelaksana program, mulai dari Dinas Sosial, Koordinator PKH Kecamatan, pendamping PKH, hingga pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antar pelaksana program juga telah dilakukan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan PKH. Pendamping PKH secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait untuk menyampaikan informasi, memantau perkembangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program. Adanya koordinasi tersebut mempermudah pelaksanaan tugas dan membantu kelancaran implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati.

Selain itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah didukung oleh pedoman dan prosedur yang menjadi acuan bagi para pelaksana dalam menjalankan program. Meskipun masih terdapat kendala terkait pembaruan data penerima manfaat, secara umum struktur birokrasi yang ada telah mampu mendukung pelaksanaan program dengan baik. Dengan demikian, indikator struktur birokrasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan mendukung tercapainya tujuan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan

#### **E. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan cukup baik berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara berjenjang dari Kementerian Sosial hingga kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rapat koordinasi, surat resmi, sosialisasi, dan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh keberadaan pendamping PKH, anggaran bantuan sosial, serta fasilitas yang menunjang kegiatan program, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah pendamping dan sarana pendukung. Pada indikator disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi telah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang berjalan cukup baik, komitmen pelaksana yang tinggi, koordinasi antar pelaksana yang efektif, serta manfaat program yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah pendamping, keterbatasan fasilitas pendukung, belum meratanya penyampaian informasi kepada sebagian penerima manfaat, serta masih adanya permasalahan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang secara umum telah berjalan cukup baik dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar pelaksana Program Keluarga Harapan terus meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat sehingga informasi yang diberikan dapat diterima secara merata dan jelas. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Pemerintah dan instansi terkait juga diharapkan dapat memperkuat sumber daya pelaksanaan program, terutama melalui peningkatan jumlah pendamping dan penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwidjaja, I., & Suprojo, A. (2021). *PELAYANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BATU DALAM PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI KELUARGA MISKIN ( PKH )*. 11, 226–232.
- Amalia, S. Della, Ratih, A., Emalia, Z., & Usman, M. (2024). *Economics and Digital Business Review*. 5(2), 745–756.
- BPS, 2024. (2024). Badan Pusat Statistika Profil Kemiskinan di Indonesia Pada September 2024. *Statistik Indonesia 2020*, 53,2025, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango*. 10(2), 581–588.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (p. 710). <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>

- Edward, G. (n.d.). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. Retrieved <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674>
- Mahulette, A., Osok, R. M., & Leuwol, F. S. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) DALAM PENGENTASAN KEMSKINAN PADA MASYARAKAT NEGERI ASSILULU KECAMATAN LEIHITU KEBUPATEN MALUKU TENGAH*. 1, 26–33.
- Perda Sidoarjo, 2024. (2024). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2024*. 1–34.
- Permensos, 2018. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*. (1), 430–439.
- Putri, D. E. (2024). *ANALISIS KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN DESA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TEPAT SASARAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*.